EQuator

Senin, 21 Februari 2011

Polda Bidik UJ dan Zulfadhli

Baru satu tersangka ditetapkan dalam kasus dana Bansos KONI. Sehari, ditargetkan tiga Pengcab dimintai keterangan. Apa peran mantan gubernur dan mantan Ketua DPRD Kalbar?

Usman Jafar

Korupsi Bansos KONI Pemprov Kalbar

No	Jenis Item	Kerugian Negara
1.	Penggelapan Bendahara KONI	Rp 2,11 M
2.	Pengeluaran KONI untuk Satgas Pra-PON	Rp 1,368 M
3.	Bantuan KONI untuk Satgas Pelatda PON	Rp 8,59 M
4.	Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar	Rp 10,07 M

Zulfadhli

PONTIANAK. Proses hukum korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar masih berkutat pada proses penyidikan. Polda menjanjikan menelusuri keterlibatan Usman Jafar (UJ) dan Zulfadhli.

"Kita akan menelusuri apakah ada keterkaitan mereka (UJ dan Zulfadhli) dengan kasus ini," kata AKBP Drs Suhadi SW MSi, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar kepada Equator, Minggu siang (20/2).

Upaya menelusuri keterlibatan mantan gubernur dan ketua DPRD Kalbar itu dilakukan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak. Karena itu, penyidik Polda akan terus meminta keterangan dari sejumlah orang yang diduga mengetahui aliran dana Bansos tersebut.

"Masih banyak yang akan kita mintai keterangan. Termasuk dari para Pengurus Cabang (Pengcab) yang ada di bawah KONI," ucap Suhadi.

Di KONI ada 33 cabang olahraga. Dari jumlah tersebut, sebagian diantaranya sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. "Pengcab yang belum juga akan kita panggil dan mintai keterangan," katanya.

Penyidik Polda Kalbar menargetkan dalam satu hari bisa memeriksa 3 Pengcab. Jika hal ini benar-benar direalisasikan, paling maksimal hanya dibutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk memeriksa seluruh pihak yang ada di KONI.

Saat pengucuran dana Bansos itu berlangsung, UJ yang Gubernur Kalbar ketika itu otomatis menjabat sebagai Ketua Umum KONI. Sementara Zulfadhli, Ketua DPRD Kalbar menempati Ketua I KONI saat itu. "Sampai sekarang polisi belum menemukan indikasi keterlibatan UJ maupun Zulfadhli. Tapi kalau nanti ada keterkaitan, mereka akan kita mintai keterangan," kata Suhadi.

Jika polisi ingin

■ Halaman 7

Polda Bidik

..... dari halaman 1

memeriksa UJ dan Zulfadhli, menurut Suhadi, ada prosedur yang harus mereka lakukan. Penyidik harus mendapat izin pemeriksaan dari Presiden melalui Mendagri lantaran posisi mereka saat ini adalah anggota DPR-RI.

"Untuk meminta izin itu, penyidik terlebih dahulu harus melakukan gelar perkara di Mabes. Gelar perkara itu dilakukan di depan Kejagung dan tim dari Kemendagri dan Bareskrim Polri," bebernya.

Hingga berita ini diturunkan, Polda baru menetapkan satu tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan bendahara KONI, Iswanto. Polda mengaku sudah memeriksa belasan saksi, termasuk mantan Sekda, Syakirman.

"Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Perkembangan kasus ini juga akan kita laporkan secara tertulis ke KPK, karena KPK yang melakukan supervise," pungkas Suhadi.

Kasus korupsi penggunaan dana Bansos untuk KONI Kalbar mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar melakukan audit regular terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008. Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO).

Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar.

Humas KPK, Johan Budi SP yang dihubungi Equator belum lama ini membenarkan, KPK akan mengawasi secara ketat penanganan Bansos KONI di Polda Kalbar. "Kita tetap akan melakukan supervisi dalam penanganan kasus tersebut," tegas Johan Budi. (bdu)